Research Review
Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol. 4, No. 1, Juli 2025 ISSN: 29622743

Dampak Sosial Masyarakat pada Program PKH di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo

(Social Impact of the Implementation of the Family Hope Program (PKH) on the Community in Dulupi Village, Dulupi Subdistrict, Boalemo Regency)

Mifta Khulzannah Saidi[1], Zuchri Abdussamad[2], Romy Tantu[3]
[1,2,3]Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo
saidimita07@gmail.com[1], zuchriabdussamad@ung.ac.id[2], romytantu@ung.ac.id[3]

Article Info

Article history:

Received: 26 Juni 2025
Revised: 21 Juli 2025
Accepted: 22 Juli 2025

Keywords:

Family Hope Program
Social Impact
Social Justice
Social Inequality

Kata Kunci:
Program keluarga Harapan
Dampak Sosial
Keadilan Sosial
Ketimpangan Sosial

Abstract

This research aims to examine the social impact of the implementation of the Family Hope Program (PKH) on the community in Dulupi Subdistrict, Boalemo Regency. The PKH program, as one of the government's efforts to alleviate poverty through conditional social assistance, has various social implications at the village level. The research approach used is descriptive qualitative, with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. Rawls' theory of social justice is used as the analytical framework in this research, with indicators consisting of beneficiary fairness, social eligibility selection, and transparency in social distribution. The research findings indicate that there was inequality in the selection process of PKH beneficiaries, leading to social jealousy among the community. Additionally, the distribution mechanism of assistance was deemed lacking in transparency, resulting in distrust among some people toward the village government. Although this program helps improve access to education and health care for beneficiary families, there were indications of dependency on assistance and weak economic empowerment of the community. Therefore, there is a need for periodic evaluation, improved validation of beneficiary data, and strengthened socialization functions to ensure the program runs more fairly, transparently, and effectively in enhancing sustainable community well-being.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak sosial dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap masyarakat di Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo. Program PKH sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui bantuan sosial bersyarat memiliki berbagai implikasi sosial di tingkat desa. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teori keadilan sosial dari Rawls digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian ini, dengan indikator keadilan penerima manfaat, seleksi kelayakan sosial, dan keterbukaan distribusi sosial.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakmerataan dalam proses seleksi penerima manfaat PKH, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial di antara masyarakat. Selain itu, mekanisme distribusi bantuan dinilai kurang transparan, mengakibatkan ketidakpercayaan sebagian warga terhadap pemerintah desa. Meskipun program ini membantu meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga penerima, terdapat indikasi ketergantungan terhadap bantuan serta lemahnya pemberdayaan ekonomi

masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi berkala, peningkatan validasi data penerima, dan penguatan fungsi sosialisasi agar program berjalan lebih adil, transparan, dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Corresponding Author:

Mifta Khulzannah Saidi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Gorontalo
saidimita07@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang bersifat multidimensi dan hingga kini masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan nasional di Indonesia (Amelia et al., 2025; Baihaqi et al., 2025). Selain berdampak pada aspek ekonomi, kemiskinan juga berpengaruh terhadap aspek sosial, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk merancang berbagai kebijakan strategis, salah satunya melalui program perlindungan sosial yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Salah satu program utama yang telah dijalankan sejak tahun 2007 adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dirancang sebagai bantuan bersyarat (conditional cash transfer) bagi keluarga miskin agar dapat mengakses layanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat secara berkelanjutan (Ashar & Pratama, 2024).

Melalui PKH, diharapkan terjadi perubahan signifikan dalam kehidupan keluarga miskin, baik dalam aspek pendidikan anak, kesehatan ibu dan anak, maupun kesejahteraan sosial secara umum (Kamariani et al., 2024; Andi et al., 2025). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa PKH berkontribusi dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah, akses layanan kesehatan, dan menurunkan angka putus sekolah di kalangan keluarga penerima (Senduk et al., 2021; Latare et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa secara makro, PKH berhasil mencapai sebagian tujuan yang diharapkan sebagai instrumen intervensi sosial pemerintah. Namun, di balik keberhasilan tersebut, implementasi PKH di tingkat lokal ternyata tidak selalu berjalan mulus. Berbagai kendala implementasi, mulai dari ketepatan sasaran, kecemburuan sosial, hingga ketergantungan penerima terhadap bantuan, masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius (Holida et al., 2023; Purba et al., 2024).

Secara lebih spesifik, berbagai studi mengungkapkan adanya fenomena sosial yang muncul di tengah masyarakat akibat pelaksanaan PKH yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan. Munculnya kecemburuan sosial antara penerima dan non-penerima, ketidakpuasan terhadap mekanisme seleksi, hingga potensi konflik horizontal di masyarakat menjadi bukti nyata bahwa program ini tidak hanya memiliki dimensi administratif, tetapi juga berdampak sosial yang cukup signifikan. Dalam konteks ini, menjadi penting untuk mengkaji tidak hanya efektivitas administratif dan ekonomis dari program tersebut, tetapi juga dampaknya terhadap kohesi sosial dan rasa keadilan di masyarakat penerima manfaat.

Literatur terbaru menyoroti pentingnya dimensi sosial dalam pengelolaan program bantuan sosial. Iskandar et al. (2024) menegaskan bahwa keadilan sosial tidak cukup hanya diukur melalui ketepatan administrasi atau kriteria teknis, tetapi juga harus memperhatikan persepsi dan nilai-nilai yang hidup dalam komunitas lokal. Hal ini sejalan dengan teori keadilan sosial yang dikembangkan oleh John Rawls dalam karyanya A Theory of Justice (1971), yang menekankan pentingnya prinsip keadilan sebagai fairness (justice as fairness). Rawls berpendapat bahwa keadilan tidak semata-mata soal distribusi, tetapi juga soal bagaimana hak-hak dasar warga dihormati dan ketimpangan hanya dapat diterima sejauh menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.

Dalam kerangka teori ini, pelaksanaan PKH di tingkat lokal, termasuk di Desa Dulupi, menjadi menarik untuk diteliti. Desa ini, sebagai salah satu wilayah di Kabupaten Boalemo, menjadi cerminan dari bagaimana pelaksanaan program nasional diterjemahkan di tingkat akar rumput. Di lapangan, ditemukan adanya ketegangan antara pendekatan teknokratis yang mengandalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan penentuan penerima, dan norma sosial yang berlaku di masyarakat tentang siapa yang sebenarnya layak mendapatkan bantuan. Ketegangan ini sering kali menimbulkan perasaan ketidakadilan di masyarakat, memperbesar jarak antara kebijakan pusat dan realitas sosial lokal.

Kesenjangan antara kebijakan teknokratis dan ekspektasi sosial masyarakat inilah yang menjadi ruang penting untuk penelitian. Selama ini, sebagian besar penelitian lebih menekankan pada aspek ekonomi dan administratif PKH, seperti efektivitas bantuan, dampak terhadap pendapatan keluarga, atau efisiensi

program. Sementara itu, kajian yang secara khusus mengulas dimensi sosial — termasuk persepsi keadilan, keterbukaan proses distribusi, dan dinamika seleksi sosial — masih terbatas. Padahal, keberhasilan program sosial sangat dipengaruhi oleh penerimaan sosial dan persepsi masyarakat terhadap keadilan pelaksanaannya (Juliani et al., 2023; Aneta et al., 2023). Jika masyarakat merasa program ini tidak adil, maka keberlanjutan dan efektivitas program akan terganggu.

Dari berbagai kajian yang ada, tampak jelas bahwa ada kebutuhan untuk mengintegrasikan pendekatan teknokratis dengan pendekatan sosial berbasis komunitas. Hal ini menjadi semakin penting mengingat bantuan sosial bukan hanya soal distribusi bantuan secara administratif, tetapi juga berkaitan dengan pembangunan rasa percaya, kohesi sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Pandangan ini diperkuat oleh studi-studi terbaru yang menekankan bahwa partisipasi masyarakat, transparansi informasi, dan pengelolaan persepsi publik adalah faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan sosial, termasuk program bantuan sosial seperti PKH.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan dan penting dilakukan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam dampak sosial dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Dulupi, Kabupaten Boalemo. Fokus penelitian ini diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu: (1) keadilan penerima manfaat, (2) seleksi kelayakan sosial, dan (3) keterbukaan distribusi bantuan. Ketiga aspek ini dianggap sebagai faktor kunci yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap program dan berdampak langsung pada kehidupan sosial mereka.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana pelaksanaan PKH berdampak terhadap masyarakat Desa Dulupi, tidak hanya dari sisi penerima manfaat, tetapi juga dari perspektif masyarakat yang tidak menerima bantuan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam kajian kebijakan sosial dan keadilan distributif di tingkat lokal. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan masukan praktis bagi para pengambil kebijakan, baik di tingkat desa, daerah, maupun pusat, untuk merancang mekanisme pelaksanaan PKH yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap kondisi sosial masyarakat.

Secara khusus, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan sosial berbasis komunitas, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses penentuan, pelaksanaan, dan evaluasi program bantuan sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti permasalahan yang ada, tetapi juga menawarkan wawasan bagi pengembangan model intervensi sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Struktur artikel ini disusun menjadi lima bagian utama. Bagian pertama berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, urgensi penelitian, serta tujuan dan signifikansi penelitian. Bagian kedua membahas kajian teori dan metode penelitian yang digunakan. Bagian ketiga menyajikan hasil penelitian dan pembahasannya berdasarkan temuan lapangan dan analisis teori. Bagian keempat memuat kesimpulan utama dari penelitian dan implikasi kebijakan yang dapat diambil. Sedangkan bagian kelima berisi daftar pustaka yang menjadi rujukan dalam penyusunan artikel ini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dampak sosial Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap masyarakat di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling sesuai untuk menggali fenomena sosial secara komprehensif melalui pemahaman konteks, makna, dan pengalaman langsung dari subjek penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan secara naturalistik realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat penerima maupun non-penerima PKH.

Desain penelitian ini adalah studi kasus tunggal, dengan fokus pada satu desa sebagai lokasi penelitian. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada intensitas pelaksanaan program PKH serta adanya laporan ketegangan sosial yang muncul sebagai akibat dari implementasi bantuan tersebut. Lokasi penelitian, yakni Desa Dulupi, dipilih secara purposive karena memiliki jumlah penerima PKH yang signifikan dan karakteristik sosial yang sesuai untuk dianalisis menggunakan teori keadilan sosial Rawls (1971). Penelitian dilaksanakan selama dua bulan, yakni pada Maret hingga April 2025.

Peneliti hadir langsung di lapangan sebagai instrumen utama yang berperan dalam menggali data secara aktif melalui interaksi sosial dengan informan. Kehadiran peneliti di lokasi penelitian juga berfungsi untuk membangun hubungan interpersonal yang intens dengan informan guna memperoleh data yang autentik dan mendalam. Informan dalam penelitian ini terdiri dari penerima manfaat PKH, masyarakat non-penerima, aparat pemerintah desa, serta pendamping program PKH. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dan pemahaman mereka terhadap program PKH.

Data dikumpulkan menggunakan tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan panduan wawancara semi-terstruktur yang

disusun berdasarkan fokus penelitian. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara diarahkan untuk menggali persepsi dan pengalaman masyarakat terkait keadilan penerima manfaat, mekanisme seleksi sosial, dan transparansi distribusi bantuan. Observasi dilakukan terhadap interaksi sosial yang terjadi dalam forum penerima bantuan dan dalam kehidupan sehari-hari warga desa. Sedangkan dokumentasi mencakup data sekunder berupa laporan pelaksanaan PKH, daftar penerima bantuan, dan arsip berita acara distribusi

Dalam proses pengumpulan data, peneliti juga melakukan pengembangan instrumen melalui uji coba terbatas kepada dua informan awal untuk menyempurnakan pertanyaan wawancara, memastikan relevansi, serta meningkatkan kejelasan bahasa yang digunakan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (1994), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara simultan sejak awal pengumpulan data hingga penulisan hasil penelitian. Proses reduksi dilakukan dengan menyaring data relevan berdasarkan fokus penelitian, penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif tematik, dan verifikasi dilakukan melalui triangulasi sumber dan waktu.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik sumber maupun metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dengan latar belakang yang berbeda, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumen pendukung. Selain itu, peneliti juga melakukan member check, yaitu memverifikasi kembali hasil temuan sementara kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti tidak menyimpang dari makna yang dimaksudkan oleh informan. Validitas penelitian diperkuat melalui kehadiran peneliti yang intensif di lapangan, pencatatan data secara rinci, dan refleksi kritis secara berkala terhadap proses penelitian.

Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat menggambarkan secara utuh dinamika sosial yang terjadi akibat pelaksanaan PKH di masyarakat pedesaan, serta memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan sosial yang lebih adil dan kontekstual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Keadilan Penerima Manfaat dalam Pelaksanaan PKH

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dulupi masih menyisakan persoalan dalam hal keadilan distribusi manfaat. Banyak warga miskin yang secara ekonomi layak untuk menerima bantuan justru tidak masuk dalam daftar penerima. Di sisi lain, terdapat individu atau keluarga yang dianggap secara ekonomi lebih mampu justru tetap menerima bantuan. Ketimpangan ini menimbulkan kecemburuan sosial dan perasaan tidak adil di tengah masyarakat, terutama dari warga yang merasa diabaikan oleh sistem seleksi penerima. Ketidakakuratan penyaluran manfaat ini mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip keadilan sosial yang seharusnya menjadi dasar pelaksanaan program bantuan sosial.

Ketidakadilan tersebut secara langsung bertentangan dengan *difference principle* sebagaimana dikemukakan oleh Rawls (1971), yang menyatakan bahwa ketimpangan hanya dapat dibenarkan jika memberikan keuntungan bagi kelompok yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dalam konteks Desa Dulupi, prinsip ini belum tercermin karena kelompok yang paling membutuhkan justru sering kali tertinggal dari proses distribusi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan bantuan belum secara nyata menjangkau sasaran yang benar-benar membutuhkan, sehingga tujuan awal dari PKH sebagai program perlindungan sosial untuk memperkuat ketahanan kelompok miskin belum tercapai secara optimal.

Temuan di lapangan ini diperkuat oleh hasil studi Purba et al. (2024), yang menyatakan bahwa ketidaktepatan sasaran dalam distribusi bantuan sosial dapat berkontribusi terhadap ketegangan sosial, menurunkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan publik, dan pada akhirnya merusak legitimasi program itu sendiri. Di Desa Dulupi, fenomena ini tidak hanya menimbulkan kekecewaan individu, tetapi juga merusak harmoni sosial antarwarga. Keadilan yang tidak dirasakan dalam konteks mikro seperti desa dapat berdampak sistemik, terutama jika tidak ada mekanisme koreksi atau evaluasi yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses penentuan penerima manfaat.

3.2 Seleksi Kelayakan Sosial dan Ketepatan Data Penerima

Permasalahan utama dalam seleksi kelayakan sosial penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dulupi terletak pada penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis penetapan penerima bantuan. Meskipun DTKS dimaksudkan sebagai acuan nasional yang valid, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa data tersebut sering kali tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat. Banyak data yang tidak diperbarui secara berkala, sehingga warga yang telah mengalami perubahan status ekonomi tetap tercatat sebagai penerima manfaat. Di sisi lain, warga miskin yang seharusnya masuk daftar justru terlewatkan karena tidak terakomodasi dalam pembaruan data. Ketergantungan pada DTKS yang statis ini menjadi kendala serius bagi pencapaian sasaran PKH yang berorientasi pada rumah tangga miskin dan rentan.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Desa Dulupi. Studi Sihombing (2023) di Sumatera Utara mengungkapkan bahwa sekitar 28% penerima PKH tidak lagi memenuhi kriteria kemiskinan, tetapi masih terdaftar sebagai penerima bantuan. Hal serupa juga ditemukan dalam pengamatan di lapangan di Desa Dulupi, di mana masyarakat mempertanyakan validitas data dan keabsahan penerima bantuan. Kondisi ini melahirkan persepsi ketidakadilan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa maupun pengelola program. Bahkan, penerima manfaat seringkali menjadi sasaran kecaman sosial karena dianggap "tidak pantas" menerima bantuan. Stigma ini memperparah hubungan sosial antarwarga dan mengurangi efektivitas program yang seharusnya membangun solidaritas sosial.

Melihat persoalan tersebut, penting kiranya untuk menerapkan sistem seleksi dan verifikasi yang lebih partisipatif, salah satunya dengan pendekatan community-based targeting. Nursuhayla dan Pangestoeti (2025) menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam proses verifikasi dan validasi penerima manfaat akan meningkatkan keakuratan data sekaligus memperkuat legitimasi sosial program. Dengan sistem ini, warga dapat berperan sebagai pengontrol sosial, memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok yang membutuhkan. Pendekatan berbasis komunitas juga akan membuka ruang dialog antara masyarakat, pemerintah desa, dan pengelola program, sehingga proses seleksi penerima tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga adil di mata masyarakat.

3.3 Transparansi dalam Mekanisme Distribusi Bantuan

Salah satu kelemahan utama dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dulupi adalah minimnya transparansi dalam mekanisme distribusi bantuan. Berdasarkan temuan penelitian, proses penyaluran bantuan sering kali dilakukan tanpa adanya sosialisasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat. Warga penerima manfaat hanya diberi informasi sepihak, sementara masyarakat yang tidak menerima bantuan tidak mendapatkan penjelasan mengenai dasar penentuan penerima. Minimnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik saat pendataan maupun saat distribusi, memicu prasangka bahwa program ini sarat kepentingan kelompok tertentu atau dimanfaatkan oleh pihak tertentu di tingkat desa. Hal ini berpotensi menimbulkan rasa curiga, kecemburuan sosial, dan ketidakpercayaan terhadap aparat desa yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program.

Ketiadaan transparansi tidak hanya berdampak pada persepsi negatif masyarakat, tetapi juga menghambat pencapaian tujuan sosial dari program PKH. Studi Holida (2023) di Kota Probolinggo mengungkapkan bahwa praktik pendistribusian bantuan sosial yang tidak transparan menjadi faktor utama tumbuhnya ketidakpercayaan warga terhadap perangkat desa. Kondisi yang sama tercermin di Desa Dulupi, di mana ketidakterbukaan informasi menimbulkan opini bahwa ada praktik pilih kasih atau ketidakwajaran dalam penyaluran bantuan. Padahal, menurut prinsip equal liberty dalam teori keadilan Rawls, setiap warga negara berhak memperoleh informasi yang jelas, termasuk terkait program sosial yang menyangkut hak mereka. Tanpa keterbukaan informasi, masyarakat akan merasa terpinggirkan dari proses yang seharusnya inklusif dan adil.

Lebih jauh, penelitian ini memperkuat argumen bahwa pelaksanaan program sosial, khususnya PKH, tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan administratif dan teknokratis yang berfokus pada prosedur formal. Implementasi program harus mempertimbangkan aspek sosial dan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Persepsi keadilan, keterlibatan masyarakat, dan transparansi informasi menjadi elemen penting yang menentukan penerimaan dan keberhasilan program. Hal ini selaras dengan kajian Pangestoeti (2025) yang menegaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap keadilan dan partisipasi mereka dalam proses pelaksanaan program sangat berpengaruh terhadap efektivitas program sosial. Tanpa transparansi, program yang dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan justru berpotensi menjadi sumber konflik sosial di masyarakat.

Dalam konteks Desa Dulupi, ketidakjelasan dalam mekanisme distribusi bantuan sosial terbukti tidak hanya berdampak pada hubungan antara warga dan pemerintah desa, tetapi juga menimbulkan potensi konflik horizontal di tengah masyarakat. Sebagian warga merasa adanya ketidakadilan dalam penerimaan bantuan, sementara pihak lain merasa dirugikan karena tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Purba et al. (2024), yang menyatakan bahwa meskipun PKH memiliki potensi besar dalam memperkuat partisipasi sosial, tanpa didukung oleh mekanisme distribusi yang adil dan transparan, program ini justru dapat memicu ketegangan sosial. Oleh karena itu, transparansi bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik dan menjaga stabilitas sosial di tingkat desa.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial yang adil dan merata di tingkat masyarakat. Tiga

aspek utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini memberikan gambaran mengenai berbagai dinamika sosial yang terjadi sebagai akibat dari implementasi program PKH.

Pertama, dari segi keadilan penerima manfaat, ditemukan bahwa program ini belum sepenuhnya menyasar keluarga yang paling membutuhkan. Ketidaktepatan sasaran menyebabkan munculnya kecemburuan sosial dan ketegangan antarwarga, khususnya antara penerima dan non-penerima manfaat. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan utama PKH untuk menjangkau kelompok paling miskin belum tercapai secara optimal.

Kedua, pada aspek seleksi kelayakan sosial, proses identifikasi dan verifikasi penerima bantuan masih bergantung pada data yang tidak akurat dan tidak diperbaharui secara berkala. Kondisi ini menyebabkan adanya keluarga yang semestinya layak menerima bantuan justru terabaikan, sementara sebagian lainnya yang tidak lagi memenuhi kriteria masih terdaftar sebagai penerima.

Ketiga, terkait keterbukaan distribusi sosial, mekanisme distribusi bantuan dinilai kurang transparan oleh sebagian besar warga. Minimnya informasi dan pelibatan masyarakat dalam proses distribusi memicu ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa dan pengelola program, serta memperlemah kohesi sosial di lingkungan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Program Keluarga Harapan di Desa Dulupi telah memberikan kontribusi positif dalam bentuk peningkatan akses terhadap layanan dasar, namun aspek sosial seperti keadilan, seleksi, dan transparansi masih menjadi tantangan besar yang perlu dibenahi. Keseluruhan temuan ini mengarah pada perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelaksanaan PKH agar tujuan program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dapat tercapai secara lebih adil, merata, dan berkelanjutan.

4.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang diperoleh, terdapat beberapa saran strategis yang dapat dijadikan rekomendasi dalam upaya perbaikan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo. Pertama, pemerintah desa bersama pendamping PKH perlu melaksanakan pemutakhiran data penerima manfaat secara berkala dengan pendekatan partisipatif. Pemutakhiran ini tidak cukup hanya mengandalkan data administratif, melainkan harus melibatkan tokoh masyarakat, ketua RT/RW, dan unsur masyarakat lain yang memiliki pengetahuan langsung tentang kondisi ekonomi warga. Melalui keterlibatan tersebut, proses validasi data akan lebih akurat dan representatif, sehingga penerima manfaat benar-benar berasal dari keluarga yang paling membutuhkan. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi kecemburuan sosial dan ketegangan antarwarga akibat ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.

Kedua, penting bagi pemerintah desa dan pendamping PKH untuk membuka ruang komunikasi yang transparan terkait mekanisme seleksi dan penetapan penerima manfaat. Sosialisasi yang dilakukan secara terbuka dan menyeluruh kepada masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses yang berjalan. Keterbukaan informasi ini juga akan meminimalkan potensi kesalahpahaman atau kecurigaan masyarakat terhadap pihak yang terlibat dalam pendistribusian bantuan. Transparansi diharapkan menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan PKH, guna membangun hubungan yang sehat antara pemerintah desa, pendamping, dan masyarakat penerima manfaat.

Ketiga, dalam jangka panjang, pemerintah daerah dan pendamping PKH perlu memperkuat pendekatan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga penerima bantuan. Bantuan tunai tidak seharusnya hanya berfungsi sebagai alat konsumtif yang bersifat sementara. Sebaliknya, program ini perlu dikombinasikan dengan kegiatan yang mendukung kemandirian ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, pendampingan usaha kecil, pemberian akses modal, dan fasilitasi pemasaran produk. Dengan strategi pemberdayaan yang terintegrasi, diharapkan keluarga penerima bantuan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial dan mampu meningkatkan taraf hidup mereka secara mandiri.

Keempat, evaluasi terhadap pelaksanaan PKH harus dilakukan secara rutin dan menyeluruh, baik dari segi administrasi, sosial, maupun dampak ekonomi yang ditimbulkan. Evaluasi ini tidak hanya difokuskan pada kepatuhan prosedur, tetapi juga pada bagaimana program tersebut berkontribusi terhadap perubahan perilaku, kesejahteraan, dan partisipasi sosial masyarakat. Hasil evaluasi yang objektif dan terbuka dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program-program sosial yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat desa.

Dengan diterapkannya saran-saran tersebut, diharapkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Dulupi dapat berjalan lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya menjadi instrumen pengentasan kemiskinan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan yang efektif dalam memutus mata rantai kemiskinan di tingkat akar rumput, sekaligus memperkuat kohesi sosial di masyarakat.

REFERENSI

Amelia, N., Oktarahmadini, S., & Harahap, A. (2025). Peran Pemerintah dalam Mengatasi Kemiskinan di Kota Medan. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik Dan Kebijakan Negara*, *2*(1), 01-23.

Andi, E. T., Andi, A. K., Hanafie, N. K., & Najamuddin, N. P. (2025). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Perspektif Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Bagi Keluarga Penerima Manfaat. *Jurnal Education and Development*, *13*(1), 494-499.

Ashar, B., & Pratama, H. (2024). Dampak Multidimensi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Jakarta. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Dan Masyarakat, 1*(3), 16. https://doi.org/10.47134/jpem.v1i3.358

Baihaqi, I., Cahayasih, A., Chaerunnisa, M., Wildana, M. A., & Lubis, B. O. (2025). Implementasi Algoritma C4. 5 Untuk Prediksi Indeks Kedalaman Kemiskinan Dan Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Daerah. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, *9*(2), 2368-2375.

Holida, N., Saputri, M. E., & Ningtias, I. C. K. (2023). Dampak Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Mayangan Kota Probolinggo. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, *1*(2), 136-158.

Juliani, R., Aneta, Y., & Tui, F. P. D. (2023). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PHK) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Dulupi. *Ilmiah Multidisiplin, 2*(8), 3373–3382.

Iskandar, I., Abduh, M. N., Sariman, S., Rasyidi, E. S., Hijriah, H., Syahrir, S., & Mallawangeng, T. (2024). Pembangunan Jalan Lingkar Berbasis Keadilan Sosial: Studi Sosiologis Di Kawasan Pesisir Kota Bontang. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, *4*(2), 71-82.

Kamariani, B. D., Asbarini, N. F. E., Ridwan, A., & Rahman, A. C. (2024). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Journal of Administrative and Social Science*, *5*(1), 205-219.

Latare, S., Harold, R., Bumulo, S., & Ali, A. (2023). Dampak Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Bangga Kecamatan Paguyaman Pantai The Impact of the Family Hope Program in Poverty Alleviation in Bangga Village, Paguyaman Pantai District. *Dynamics Of Rural Society Journal, 1*(1), 10-19.

Maaruf, N. A., & Prasetyo, H. (2024). Teori Keadilan Jhon Rawl Kaitanya Dengan Pemerataan Distribusi Obat Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 5*(3).

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.

Nursuhayla, R., & Pangestoeti, W. (2025). Evaluasi Ketepatan Sasaran Program Bansos PKH Di Provinsi Kepulauan Riau: Studi Kasus Salah Sasaran Di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, *3*(1), 11-16.

Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. 2. *The Law of Peoples*, *67*.

Pangestoeti, W. (2025). Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Subsidi Energi Dan Implikasinya Terhadap Konsumsi Rumah Tangga. *Jurnal Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, *3*(1), 17-22.

Purba, R. Y. V., Maharani, A., Harahap, K. O. P., & Berlianti, B. (2024). Dampak Sosial Program PKH dan PBI BPJS pada Penerima Bantuan: Perspektif Masyarakat. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *2*(4).

Senduk, N. V., Kiyai, B., & Plangiten, N. (2021). Dampak Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, *7*(101).

Sihombing, E. N. (2023). *Problematika Implementasi Pendataan Proyek Program Keluarga Harapan (PKH)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD" APMD").